

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab analisis dan pembahasan ini akan dipaparkan dengan pertama-tama bagaimana kebijakan Indonesia di Laut Natuna Utara. Dengan diresmikannya peta baru Indonesia dengan wilayah Natuna Utara yang menyentuh wilayah Laut China Selatan. Kemudian penjelasan terkait bagaimana Laut China Selatan menjadi wilayah konflik antar beberapa Negara di wilayah Asia.

Respons yang diberikan China terhadap Kebijakan Indonesia di Laut Natuna Utara mulanya dipicu ketika Pemerintah Indonesia mengumumkan Peta barunya atas Perairan Natuna Utara. Peta tersebut juga memicu konflik di wilayah Laut China Selatan yang menghasilkan respons yang ambigu oleh China. Dalam mengkaji bagaimana respons yang diberikan China kita dapat mengambil gambaran secara luas bagaimana hubungan China dengan Indonesia.

Pada dasarnya China memang merupakan negara yang bersahabat dengan Indonesia. Hubungan yang dimiliki oleh kedua negara tersebut sudah mencakup di berbagai sektor, seperti Sektor Ekonomi, Sektor Pengembangan Infrastruktur, Sektor Kelautan, Hingga Sektor Sosial dan Budaya. Konflik yang terjadi di wilayah Natuna Utara bagi China bukanlah sebuah penghalang atau penghambat bagi kedua negara tersebut untuk tetap memiliki hubungan kerja sama bilateral.

Meskipun bagi China Indonesia tidak termasuk kedalam Negara yang mengklaim Kawasan Laut China Selatan, Namun Peta yang dikeluarkan oleh Indonesia pada 2017 rupanya mengundang perhatian China. Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan sebab tingkat aktivitas China yang cukup tinggi di kawasan ZEE Indonesia. Aktivitas yang dilakukan China di kawasan Natuna Utara rupanya mengganggu ketenangan para nelayan Indonesia yang sedang memancing ikan di wilayah ZEE Natuna Utara.

4.1 Kebijakan Indonesia di Laut Natuna Utara

Indonesia menyatakan bahwa Laut Natuna Utara merupakan wilayahnya. Pada 14 Juni 2017 Pemerintah Indonesia dibawah pemerintahan Joko Widodo secara resmi memperbaharui Peta Nasional Indonesia. Hal ini ditunjukkan guna memberikan penegasan terhadap perbatasan-

perbatasan wilayah Indonesia baik wilayah daratan maupun perairan. Penegasan tersebut juga sudah disepakati oleh beberapa negara tetangga dan diakui secara internasional.

Gambar 2: Peta Baru Kawasan Natuna Utara

Sumber: (Setiawan, 2020: 58)

Selain itu Pemerintah Indonesia juga melakukan perubahan nama terhadap Kawasan Laut



China Selatan. Hal tersebut merupakan langkah politik luar negeri Indonesia yang diambil guna memberikan respons terhadap klaim china di Laut China Selatan. Indonesia merubah nama kawasan Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Hal ini tentunya merujuk pada UNCLOS 1982 (Sambogo, 2019).

Dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, telah ditegaskan bahwa laut China selatan masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, China mengajukan klaim historisnya kepada diplomasi maritim Indonesia, di kawasan laut Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Perairan yang dilewati oleh perdagangan internasional ini memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah, cadangan minyak bumi yang terdapat di laut Natuna diperkirakan mencapai 14.386.470 barrel dan 112.356.680 barrel gas bumi. (Azanella, 2021)

Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya memiliki hak atas perairan yang terbentang diantara dan sekitar pulau. Merujuk pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat yang berbunyi “...kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Itu juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat...”. (DPR RI, 2015)

UNCLOS 1982 Pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 menetapkan tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia maka Kepulauan Natuna merupakan negara pantai

yang masuk ke dalam wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) yang berjarak 200 mil laut. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka Indonesia secara legal memiliki hak untuk melakukan eksplorasi, dan pemanfaatan sumber kekayaan alam yang ada di dalam perairan tersebut. (Ernandi, 2017)

Pandangan China terhadap Indonesia dalam hal ini masih menjadi hal yang belum sepenuhnya di ungkapkan, karena pemerintah China melihat berbagai hal krusial yang menjadi pertimbangan dengan adanya pernyataan tersebut yang disebutkan pula bertentangan dengan UNCLOS, Penolakan Atas Pernyataan tersebut tidak membuat China mencabut hak historikalnya, tetapi dengan pertimbangan yang ada pemerintah China tetap berhati-hati dalam menghadapi Respons yang ditunjukkan oleh Indonesia.

Tak hanya peta historis yang menggambarkan Nine Dash Line sebagai klaim China atas perairan Natuna, menurutnya wilayah perairan tersebut juga merupakan wilayah tradisional nelayan China (Traditional fishing ground) untuk menangkap ikan, dengan dasar bahwa sejak zaman Dinasti Ming, wilayah tersebut merupakan wilayah perbatasannya. Atas hal tersebut seperti yang diputuskan oleh South China Sea Tribunal 2016, menyebutkan bahwa tak ada hak atas China dalam Laut China Selatan. (Simanjuntak, 2020)



Gambar 3: *Nine Dash Line Map China*

Sumber: BBC (2016)

Pernyataan yang dibuat China atas Nine Dash Line tidak hanya sebuah klaim teritorial semata. Karena didalam sebuah keputusan suatu Negara, dibutuhkan adanya pembahasan lebih lanjut karena sebuah keputusan yang telah bulat dan siap untuk di nyatakan membutuhkan referensi dari para ahli pengambil keputusan. Sebab dengan adanya suatu kebijakan atau keputusan yang akan dikeluarkan oleh suatu Negara yang menjadi pertimbangan ialah citra Negara itu sendiri.

Apabila suatu Negara memiliki tujuan untuk mengklaim suatu wilayah dengan dasar acuan hukum yang dimiliki oleh Negara tersebut dan tidak melalui hukum internasional maka harus diadakan perundingan dengan Negara-Negara yang bergabung dengan wilayah tersebut baik secara bilateral maupun multilateral agar mencapai kesepakatan bersama dan tertulis didalam suatu perjanjian internasional. Seperti yang telah dilakukan oleh PBB dalam UNCLOS 1982, namun hingga saat ini China belum melakukan perundingan secara resmi untuk menindak lanjuti klaim tersebut, melainkan hanya tetap berpegang dengan dasar yang dimilikinya yaitu Nine Dash Line Map. (Silalahi, 2021)

Menurut (Silalahi, 2021) dalam UNCLOS pasal 289 tertulis bahwa klaim yang diajukan oleh China atas Perairan Natuna Utara diperbolehkan dengan beberapa syarat yang tertulis salah satunya itu bahwa klaim yang diajukan oleh suatu pihak dapat dipastikan tidak menimbulkan sengketa dengan pihak lain, dalam hal ini wilayah yang diklaim tidak dalam teritorial atau kedaulatan Negara lain, namun yang terjadi adalah klaim yang diajukan oleh China ternyata menimbulkan sengketa dengan banyak pihak khususnya Negara-Negara yang memiliki teritorial di dalam klaim tersebut, sehingga klaim tersebut dikatakan sebagai klaim sepihak.

China Juga melakukan banyak aktivitas ilegal di kawasan yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya dan hal tersebut dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Seperti yang dilakukan China di kawasan Natuna Utara yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia.

Laut Natuna Utara merupakan wilayah di bagian timur Laut China Selatan yang diklaim oleh Indonesia sebagai bagian dari perairan teritorialnya. Daerah ini kaya akan sumber daya alam, termasuk cadangan minyak dan gas, dan juga merupakan tempat penangkapan ikan yang penting.

Kebijakan Indonesia di Laut Natuna Utara sebagian besar didorong oleh keinginan untuk melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayahnya, serta mempertahankan kepentingan ekonominya di kawasan tersebut. Untuk itu, Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk menegaskan klaimnya di wilayah tersebut, antara lain:

1. Memperkuat kehadiran militernya: Indonesia telah meningkatkan kehadiran militernya di Laut Natuna Utara, termasuk dengan mengerahkan lebih banyak kapal dan pesawat ke wilayah tersebut.

2. Meningkatkan upaya diplomasi: Indonesia juga berupaya memperkuat upaya diplomasi di kawasan, termasuk dengan melibatkan negara lain dan organisasi regional untuk membangun dukungan terhadap posisinya.
3. Melindungi hak penangkapan ikannya: Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak penangkapan ikannya di Laut Natuna Utara, termasuk dengan menindak penangkapan ikan ilegal dan bekerja untuk menjaga kelestarian sumber daya laut kawasan itu.
4. Mencari penyelesaian melalui lembaga internasional: Indonesia juga berupaya menyelesaikan sengketa di Laut Natuna Utara melalui lembaga internasional seperti PBB dan organisasi regional.

Secara keseluruhan, kebijakan Indonesia di Laut Natuna Utara didorong oleh kombinasi pertimbangan strategis dan ekonomi, serta mencerminkan komitmen negara untuk mempertahankan kedaulatan dan melindungi kepentingannya di wilayah tersebut (Widodo, 2020).

Sebagai koridor maritim yang vital, Laut China selatan yang berdekatan wilayah kedaulatan beberapa Negara, merupakan jalur air militer dan komersial yang penting. Selain itu, wilayah Laut China Selatan sangat strategis; menguasai kawasan ini berdasarkan fakta sejarah dianggap sebagai kepentingan nasional. Sehingga wilayah tersebut dapat dikatakan sebagai wilayah yang rawan akan konflik dengan berbagai faktor yang telah diuraikan diatas. (Sahri, 2017)

Tindakan China dalam mengklaim Natuna sebagai wilayah kedaulatannya membuat pemerintah Indonesia melakukan kajian strategis dan kebijakan untuk menindak lanjuti konflik yang terjadi di perairan natuna, dengan tujuan utama diadakannya kajian tersebut ialah untuk mempertahankan hak dan kedaulatan atas perairan tersebut, Respons awal yang tunjukan oleh pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu dengan membuat kebijakan untuk mengirimkan dokumen-dokumen resmi yang menyatakan bahwa perairan tersebut adalah secara sah milik Indonesia, dan memanfaatkan hubungan diplomatik dengan china untuk mengatasi konflik yang terjadi. Selanjutnya pada masa kepemimpinan presiden Jokowi Widodo yang lebih mengedepankan penegasan dengan komunikasi internasional dan melakukan kebijakan dengan pembuatan markas militer di natuna

untuk berjaga-jaga dan juga pemerintah Indonesia memberikan bukti berupa dokumen penting lainnya guna memperkuat fakta bahwa Natuna masih dalam kedaulatan Republik Indonesia.

Indonesia memberikan beberapa kebijakan terkait konflik yang terjadi di laut China selatan sebagai bentuk respons pemerintah Indonesia yang menolak klaim sepihak oleh China dan pemerintah Indonesia juga tidak mengakui Nine Dash-Line yang menjadi dasar klaim sepihak tersebut. Dengan alasan bahwa hal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang diakui oleh hukum laut internasional atau UNCLOS 1982. Salah satu kebijakan yang membuat China memberikan reaksi keras yaitu ketika pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi secara resmi mengganti nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara yang disampaikan langsung oleh Deputy I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman, Arid Havas Oegroseno (Agustino, 2017).

Kebijakan tersebut dilakukan bukan hanya untuk merespons China terkait klaim nya di laut Natuna tetapi hal tersebut juga dilakukan sebagai bentuk penyesuaian beberapa aktivitas minyak dan gas alam yang dilakukan di wilayah perairan Natuna, Nama Natuna Utara juga sudah digunakan untuk sejumlah aktivitas eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas alam di wilayah Natuna. Hal tersebut dikatakan juga mendasar pada peta lama milik Indonesia Edisi 1953 yang tertulis di dalamnya bahwa Laut China selatan wilayah kawasannya hampir mendekati Laut Jawa yang berbatasan langsung dengan selat Karimata.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk penyelesaian yaitu dengan cara litigasi atau penyelesaian perkara dengan jalur pengadilan yang dimana akan dipertemukan nya kedua pihak yang bersengketa secara langsung. Dengan upaya litigasi tersebut memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk memberikan gugatan-gugatan terkait sengketa tersebut, dan pihak-pihak tersebut juga berhak untuk membantah gugatan tersebut. Banyak upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia baik secara litigasi maupun non-litigasi sebagai upaya penyelesaian sengketa yang terjadi antara kedua negara yaitu Indonesia dan China (Novianto, 2020)

Dengan menganut sistem politik luar negeri yaitu bebas dan aktif pemerintah Indonesia tentunya melancarkan beberapa upaya diplomasi untuk mencapai perdamaian dari permasalahan sengketa perairan Natuna, dengan sistem tersebut Indonesia memilih untuk tidak berpihak dan netral, dan tentunya dengan pola komunikasi yang baik.

Selain itu, Politik Luar negeri Indonesia juga memiliki beberapa pendekatan dalam menangani konflik teritorial yang terjadi di Natuna, salah satunya yaitu pendekatan geopolitik, pendekatan ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan dasar bahwa adanya keterkaitan antara politik dengan geografis Indonesia. Sebuah perkembangan yang pesat terjadi di dalam lingkup geo-ekonomi dan geo-politik yang dimana hal tersebut merupakan hal yang sudah seharusnya menjadi perhatian bagi bangsa Indonesia khususnya, perkembangan ekonomi dan teknologi di negara-negara di dunia khususnya di asia sudah mulai merambah ke wilayah maritim yang menjadi inti dari perdagangan antar negara, hal yang perlu menjadi perhatian yaitu bahwa Indonesia harus mulai memperhatikan sektor maritim. Pemerintah Indonesia juga sudah mulai mempersiapkan para ahli di berbagai bidang yang berkaitan dengan kelautan, semua hal yang berkaitan dengan teknis, teknologi, strategi hingga terkait dengan hukum laut internasional (Ardityo, 2018)

Upaya lainnya juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia di masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), Pada dasarnya hubungan Indonesia dan China cukup erat terutama dalam sektor ekonomi, Kedua pihak memiliki beberapa kerjasama di bidang pembangunan infrastruktur, Salah satunya yaitu Program One Belt One Road (OBOR), OBOR merupakan Program Mega-Infrastruktur yang dilakukan oleh China terhadap negara-negara yang berkaitan dengannya khususnya negara-negara yang terlibat atau terkait dalam Klaim Natuna. Dengan kerjasama tersebut beberapa negara memilih untuk merubah sikap dan menjalin hubungan baik dengan China, namun Pemerintah Indonesia memilih untuk tetap mempertahankan kedaulatan maritimnya di Laut Natuna, meski disisi lain hubungan kerjasama tetap berjalan (Andika, 2018).

Meski demikian beberapa ketegangan antara pihak China dan Indonesia pun sering terjadi di perairan tersebut, ketegangan dimulai dengan banyaknya kapal-kapal asing milik China yang memasuki kawasan ZEE Indonesia di Laut China Selatan. Beriringan dengan hal tersebut membuat pemerintah Indonesia mengambil kebijakan terkait, pada 23 Juni 2016, Presiden Jokowi Memberikan respons yang tegas dengan berpatroli dan mengadakan rapat di atas Kapal KRI Imam Bonjol-383 di Perairan Natuna.

Pemerintah China secara konsisten menyatakan tidak mengakui zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara. Hal ini disebabkan klaim “sembilan garis putus-putus” China atas Laut China Selatan, yang meliputi Laut Natuna Utara, bertentangan dengan ZEE yang diklaim oleh Indonesia dan negara lain di kawasan tersebut.

Indonesia telah menanggapi hal ini dengan berulang kali menyatakan tidak mengakui klaim sembilan garis putus-putus China dan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan hak berdaulatnya di Laut Natuna Utara. Indonesia juga telah mencari dukungan dari negara-negara lain di kawasan dan masyarakat internasional dalam mempertahankan posisinya dalam isu tersebut.

Dalam praktiknya, Indonesia telah mengambil sejumlah langkah untuk menegaskan kedaulatannya di Laut Natuna Utara, antara lain dengan meningkatkan patroli angkatan laut di kawasan tersebut dan membangun fasilitas militer di beberapa pulau di kawasan tersebut. Ia juga berusaha untuk memperkuat hubungan ekonomi dan diplomatiknya dengan negara-negara lain di kawasan itu, dalam upaya untuk membangun front persatuan melawan klaim teritorial China.

Secara keseluruhan, situasi di Laut Natuna Utara masih menjadi sumber ketegangan antara Indonesia dan China, dan kemungkinan akan terus menjadi titik pertikaian kedua negara di masa mendatang. kepentingan yang dimiliki oleh Indonesia di Perairan Natuna salah satunya ialah mempertahankan Kedaulatan Maritim yang berdekatan dengan Laut China Selatan, Kepentingan lainnya ialah demi mempertahankan kestabilan kawasan Asia Tenggara, dengan tetap mencari solusi agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan damai dan guna mencegah konflik-konflik lainnya yang lebih serius.

Hal lain yang juga menjadi perhatian Pemerintah Indonesia adalah demi menjaga kredibilitas UNCLOS 1982, hal yang juga menjadi prioritas Indonesia ini didasari oleh klaim China yang tidak berlandaskan hukum yang cukup kuat, dalam hal ini terdapat beberapa instansi dari pemerintah Indonesia yang memiliki hak atau kewenangan untuk menegakkan hukum di kawasan kedaulatan ZEE tersebut, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL), Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Keamanan Laut atau Bakamla, Ketiga instansi tersebut melakukan kerjasama untuk menegakan hukum dan berpatroli di kawasan ZEE Indonesia.

4.2 Konflik Kawasan Laut China Selatan

Laut China Selatan dengan luas mencapai 3.5 juta km persegi merupakan wilayah rentan terjadi konflik perbatasan. Laut China Selatan sendiri berada di Samudera Pasifik yang berbatasan dengan beberapa Negara. LCS membentang dari wilayah singapura dan selat malaka hingga pesisir Selat Taiwan. Kawasan LCS juga merupakan perairan terluas kedua setelah kelima samudra. Perairan lcs memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan wilayah

tersebut juga memiliki peran penting sebab menjadi jalur perdagangan, distribusi minyak bumi hingga jalur pelayaran internasional. China Mengklaim kawasan tersebut dengan *Nine Dash Linenya* (Darajati, 2018).

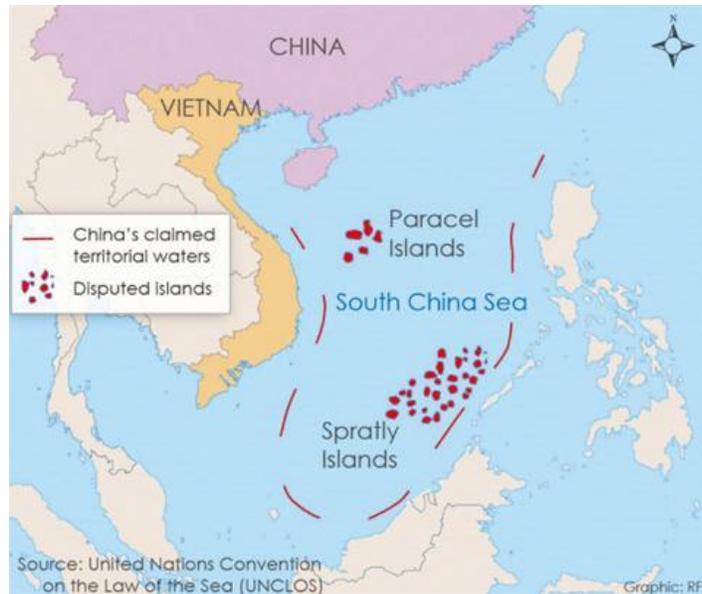
Terdapat 5 negara yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam. Mereka memiliki pandangan berbeda tentang klaim Laut China Selatan yang dilakukan oleh China. Pada 2009 hingga 2011, Brunei sempat bersengketa dengan Malaysia terkait eksploitasi minyak dan gas di wilayah Laut China Selatan. Hingga akhirnya terselesaikan dan Brunei memiliki hak untuk mengeksploitasi kawasan tersebut.

Konflik yang terjadi di Laut China Selatan yang disebabkan oleh *Claimant State* dan pembuatan *Nine Dash Line* yang dilakukan sepihak oleh China. Brunei Darussalam sebagai salah satu negara yang termasuk dalam konflik perbatasan yang terjadi di Laut China Selatan mengambil langkah untuk bandwagoning dengan China. Brunei memilih untuk tidak menentang klaim China di Laut China Selatan, dan memilih untuk bandwagoning. Sikap yang dilakukan Brunei tersebut didasari oleh beberapa faktor yaitu terkait dengan kondisi negara dan terkait faktor ancaman (Purwantoro, 2020).

Malaysia juga memiliki kepentingan di kawasan Laut China Selatan. Malaysia turut mengklaim sebagian wilayah perairan di kawasan Laut China Selatan. Malaysia mengklaim 5 atol atau pulau karang di kepulauan Spratly yang diduduki oleh Malaysia dari tahun ke tahun yaitu:

1. 1983 Malaysia menduduki Swallow Reef
2. 1986 Malaysia menduduki Mariveles Rees dan Ardasier Reef
3. 1999 Malaysia menduduki Investigator Shoal dan Erica Reef

Selain itu, Malaysia juga meletakkan penanda untuk kedaulatannya di pulau karang yang tidak Malaysia duduki yaitu Dallas Reef dan Royal Charlotte Reef (Storey, 2020).



Gambar 4: Peta Kepulauan Spratly

Sumber: (Runhas, 2021)

Malaysia dalam hal ini memberikan pernyataan bahwa mereka akan menyelesaikan konflik yang terjadi di kawasan Laut China Selatan secara damai. Keputusan yang dibuat oleh Malaysia yaitu menghormati hukum laut internasional (UNCLOS). Malaysia juga tidak mengakui *claimant state* China atas Laut China Selatan, Menurutny klaim tersebut tumpang tindih dan tidak mendasar.

Filipina juga menolak atas klaim dan aktivitas China di Laut China Selatan. Pada 2013, mereka mengajukan keberatan kepada Mahkamah Arbitrase United Nation Convention on the law of the Sea (UNCLOS) di Den Haag, Belanda. Filipina mem protes China atas aktivitas ilegalnya di wilayah kedaulatan Filipina. Mereka mengatakan bahwa China menangkap ikan dan membangun pulau buatan di wilayahnya. Filipina menentang bahwa klaim *Nine Dash Line* bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan Hukum Laut Internasional (UNCLOS) (Adi, 2021).

Pada 2016, Mahkamah Arbitrase Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memberikan keputusan bahwa China tidak memiliki dasar hukum atas klaimnya di wilayah Laut China Selatan. Namun, pemerintah China tidak menerima keputusan Mahkamah arbitrase tersebut.

Pada Senin, 25 Juli 2016, Filipina akhirnya setuju menarik tuntutannya agar pertemuan ASEAN tetap menghasilkan pernyataan bersama. Dalam pernyataan bersama disepakati, ASEAN meminta resolusi damai terhadap sengketa Laut China Selatan sesuai dengan Hukum Internasional, termasuk hukum laut PBB yang dijadikan rujukan pengadilan arbitrase internasional, dan sepakat untuk mengendalikan diri dari aktivitas yang akan meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut China Selatan.

Konflik antara Vietnam dan China di Laut China Selatan, juga dikenal sebagai Laut Timur di Vietnam, adalah sengketa wilayah yang sudah berlangsung lama atas kedaulatan beberapa pulau kecil, terumbu karang, dan atol di wilayah tersebut. Wilayah yang disengketakan ini diyakini kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas, dan juga penting secara strategis untuk jalur pelayaran dan operasi militer.

Konflik dimulai pada tahun 1970-an, ketika Vietnam dan China mulai menegaskan klaim mereka atas wilayah yang disengketakan. Vietnam secara historis menyatakan bahwa ia memiliki kedaulatan atas pulau-pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan, berdasarkan kehadirannya yang telah berlangsung lama di wilayah tersebut dan ikatan sejarah dan budayanya dengan pulau-pulau tersebut. China, di sisi lain, telah mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau dan terumbu karang berdasarkan kontrol historisnya atas wilayah tersebut dan keyakinannya bahwa ia memiliki hak untuk mempertahankan kepentingan teritorialnya.



Gambar 5: Peta Wilayah Kedaulatan Filipina

Sumber : (Tharoor, 2014)

Laut China Selatan adalah badan air yang terletak di sebelah timur Vietnam, di sebelah selatan China, dan di sebelah barat Filipina dan Taiwan. Ini adalah wilayah yang penting secara strategis dan ekonomis, karena merupakan rumah bagi sejumlah jalur pelayaran penting dan diyakini mengandung cadangan minyak dan gas alam yang signifikan. Ini juga merupakan rumah bagi beberapa gugusan pulau kecil, termasuk Kepulauan Spratly dan Kepulauan Parcel, yang diklaim oleh beberapa negara di wilayah tersebut.

Selain sengketa wilayah gugusan pulau, juga sengketa hak atas sumber daya alam di Laut China Selatan. Banyak negara di kawasan ini bergantung pada Laut China Selatan untuk mata pencaharian ekonomi mereka, dan diyakini terdapat cadangan minyak dan gas alam yang

signifikan di kawasan tersebut. Sumber daya ini seringkali berada di wilayah yang disengketakan oleh banyak negara, yang menyebabkan ketegangan lebih lanjut.

Konflik di Laut China Selatan berpotensi meningkat menjadi konflik regional yang lebih besar, karena banyak negara yang terlibat memiliki kemampuan militer yang kuat dan didukung oleh kekuatan besar dunia. Amerika Serikat, khususnya, memiliki kehadiran yang kuat di kawasan ini dan secara historis berperan dalam menjaga stabilitas dan menegakkan kebebasan navigasi. Namun, Amerika Serikat telah menghadapi kritik atas penanganannya terhadap situasi tersebut, dengan beberapa orang berpendapat bahwa itu belum cukup untuk mengatasi tindakan agresif China di Laut China Selatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, ada upaya untuk menyelesaikan konflik di Laut China Selatan secara damai melalui diplomasi dan negosiasi internasional. Pada tahun 2016, misalnya, Filipina dan China mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai di Laut China Selatan, dan pada tahun 2017, Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan China menyetujui seperangkat pedoman untuk resolusi damai sengketa di daerah. Meskipun upaya tersebut telah membawa beberapa kemajuan, konflik di Laut China Selatan tetap menjadi sumber ketegangan dan ketidakpastian di kawasan tersebut (Morgulis, 2020).

Konflik di Laut China Selatan merupakan masalah yang kompleks dan multifaset yang melibatkan sejumlah negara di kawasan dan berpotensi meningkat menjadi konflik kawasan yang lebih besar. Ini berpusat pada klaim teritorial dan maritim yang bersaing, serta perselisihan atas sumber daya alam, dan telah diperburuk oleh tindakan China dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun ada upaya untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui diplomasi dan negosiasi internasional, situasinya tetap tegang dan tidak pasti (Sayidiman, 2020)

Dalam beberapa tahun terakhir, konflik telah meningkat, dengan Vietnam dan China terlibat dalam pembangunan militer dan melakukan patroli angkatan laut di wilayah tersebut. Kedua negara juga telah mengerahkan personel dan peralatan militer ke wilayah yang disengketakan, yang menyebabkan serangkaian kebuntuan dan insiden antara angkatan laut masing-masing.

Konflik juga menarik kekuatan regional lainnya, termasuk Filipina dan Taiwan, yang memiliki sengketa teritorial mereka sendiri dengan China di Laut China Selatan. Amerika Serikat juga terlibat dalam perselisihan tersebut, dengan Angkatan Laut AS melakukan operasi kebebasan navigasi di wilayah tersebut untuk menantang klaim teritorial China (Thayer, 2019).

Secara keseluruhan, konflik antara Vietnam dan China di Laut China Selatan masih belum terselesaikan dan menjadi sumber ketegangan kedua negara. Ini adalah perselisihan yang kompleks dan beragam yang melibatkan berbagai masalah hukum, politik, dan strategis, dan kemungkinan akan terus menjadi titik pertikaian antara kedua negara di masa depan.

4.3 Respons China Terhadap Laut Natuna Utara

Berdasarkan kebijakan Indonesia terkait Laut Natuna Utara diatas, dalam hal ini China memberikan beberapa bentuk respons. Banyak hal yang menjadi sebab dari bercabangnya respons yang diberikan oleh China. Peneliti akan membahas terkait respons tersebut menjadi 3 sub bagian, yaitu:

1. Respons Koersif
2. Respons Persuasif
3. Respons Proaktif

Respons yang diberikan oleh China terhadap Natuna Utara cukup ambigu karena respons tersebut berbeda di setiap situasi dan terlihat bahwa China tidak ingin memiliki konflik lebih lanjut dengan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pihak China yang memiliki kepentingan di Indonesia khususnya di bidang kerja sama Bilateral.

Kebijakan luar negeri China dibentuk oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan nasionalnya, nilai dan cita-citanya, serta politik dalam negerinya. Dalam beberapa dekade terakhir, China telah muncul sebagai pemain global utama, dengan ekonomi yang berkembang pesat dan pengaruh militer dan diplomatik yang meningkat. Beberapa elemen kunci dari kebijakan luar negeri China meliputi (Wang, 2020):

1. Non-interferensi: China secara tradisional mengadopsi kebijakan non-intervensi dalam urusan internal negara lain, dan secara umum berhati-hati untuk terlibat dalam konflik atau perselisihan di bagian lain dunia.
2. Mempromosikan pembangunan ekonomi: Tiongkok berfokus pada peningkatan pembangunan ekonomi dan peningkatan standar hidup di dalam negeri, dan berupaya memperluas pengaruh ekonominya ke luar negeri melalui prakarsa seperti Inisiatif Sabuk dan Jalan dan proyek infrastruktur lainnya.

3. Membangun kemitraan strategis: Tiongkok telah berupaya membangun kemitraan strategis dengan berbagai negara, termasuk negara maju dan berkembang, untuk memajukan kepentingan ekonomi dan strategisnya.
4. Memperkuat institusi internasional: China juga telah bekerja untuk memperkuat institusi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi regional, dan telah berusaha untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam membentuk pemerintahan global.
5. Melindungi kedaulatan nasional: China secara tradisional memberikan penekanan kuat pada perlindungan kedaulatan nasional dan integritas teritorialnya, dan bersedia menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan kepentingannya. Hal ini menyebabkan ketegangan dengan beberapa negara tetangganya, terutama terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan.

Secara keseluruhan, kebijakan luar negeri China didorong oleh kombinasi faktor ekonomi, strategis, dan ideologis, dan telah berkembang secara signifikan dari waktu ke waktu karena kepentingan dan prioritas negara telah berubah.

Pemikir kebijakan luar negeri adalah individu yang telah memberikan kontribusi signifikan pada bidang politik luar negeri melalui tulisan, penelitian, dan kontribusi intelektual lainnya. Orang-orang ini mungkin termasuk akademisi, pembuat kebijakan, dan pakar lain yang telah mengembangkan teori, kerangka kerja, dan wawasan yang telah membantu membentuk cara kita berpikir dan memahami kebijakan luar negeri.

4.3.1 Respons Koersif China

Salah satu Respons China dalam menyikapi kebijakan Indonesia di Laut Natuna Utara yaitu dengan Respons Koersif. Respons ini dilakukan oleh pemerintah China dengan tetap memaksakan kehendaknya untuk berdaulat di wilayah Laut China Selatan dengan Nine Dash Line. Respons Koersif yang dilakukan dengan penggunaan instrumen kekuatan militer. Hal ini ditunjukkan China di kawasan Laut Natuna Utara untuk menentang Wilayah ZEE sebagai wilayah Indonesia.



Gambar 6: Kapal perang China di Kawasan Natuna Utara

Sumber: Tempo.co (2021)

China dalam hal ini menekankan bahwa Nine Dash Line tetap menjadi wilayah teritorialnya. Meskipun China sudah mengetahui keberadaan Laut Natuna Utara yang merupakan ZEE Indonesia dengan dasar UNCLOS 1982, China tetap melakukan aktivitas di wilayah Laut Natuna Utara yang masuk kedalam teritorial China. Menurut mereka masih memiliki hak untuk berlayar dan mencari ikan di wilayah tersebut.

China cenderung tidak menanggapi sikap Indonesia dalam aktivitas tersebut. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, pada konferensi Pers di Beijing, *“So whether the Indonesian side accepts it or not, nothing will change the objective fact that China has rights and interests over the relevant waters”* (Maulia, 2020) China menyatakan bahwa baik sikap Indonesia menerima atau menolak terkait klaimnya, hal tersebut tidak akan merubah fakta objektif China bahwa mereka memiliki hak dan kepentingan di perairan Natuna Utara.

China turut memberikan respons yang cukup tegas dengan aktivitasnya di Laut Natuna Utara memberikan. China juga meminta Indonesia untuk menghentikan aktivitas pengeboran minyak di wilayahnya. Protes ini ditunjukkan sebagai bentuk Deklarasi kepemilikan China atas Laut China Selatan.



Gambar 7. Kapal Coast Guard China

Sumber: (Setiawan, 2020)

Pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Kementerian luar negeri China merupakan bentuk Respons China bahwa mereka tetap berpegang teguh kepada landasannya dalam menjaga kedaulatan di Laut China Selatan. Dalam hal ini China tetap mengizinkan para nelayan mereka untuk mencari ikan di wilayahnya, yang masuk kedalam ZEE Indonesia. Penangkapan yang dilakukan tentunya dijaga ketat oleh Pemerintah China guna mengawasi para nelayannya agar tidak diganggu oleh pihak lain. China mengirimkan kapal-kapal angkatan laut mereka untuk mengawal para nelayannya

Kementerian Luar negeri China juga mengirimkan surat diplomasi yang berisikan protes atas aktivitas yang dilakukan pemerintah Indonesia. China memprotes kegiatan latihan militer Garuda Shield. Pihaknya mengkhawatirkan tentang kestabilan keamanan wilayah Laut China Selatan. Hal ini disampaikan melalui surat resmi mereka. Latihan militer tersebut juga melibatkan tentara dari Amerika Serikat Dengan jumlah total 4.500 pasukan.



Gambar 8: Latihan Militer Garuda shield Bersama Amerika Serikat

Sumber: antaranews.com

Hak berdaulat dan hak sejarah yang dipertahankan oleh China tergabung dalam klaim *Nine Dash Line* (Hayton, 2016). Namun menurut BRIN dalam risetnya menyampaikan bahwa, Beijing tidak menyampaikan secara jelas terkait titik koordinat pasti dari *Nine Dash Line* tersebut. Hal tersebut tentunya menimbulkan konflik di berbagai wilayah yang berbatasan di sekitaran Laut China Selatan (BRIN, 2021).

China juga mengerahkan Angkatan Laut, kapal-kapal penjaga pantai, dan 300 kapal milisi maritimnya untuk menjaga keamanan dan berpatroli di wilayah Laut China Selatan (Departemen Pertahanan AS, 2021). Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas aktivitas yang dilakukan oleh Negara-Negara di kawasan Laut China Selatan yang melakukan Pengeboran minyak dan gas, dalam hal ini termasuk Indonesia. Penegasan China atas wilayah teritorialnya tersebut mengundang ketegangan bagi Negara-Negara ASEAN, alhasil Negara-Negara tersebut meningkatkan Militerisasi di zona maritim mereka demi menjaga stabilitas keamanan dari hadirnya kekuatan-kekuatan di wilayah Laut China Selatan (Seah, 2021).

China adalah Negara utama dalam konflik Laut China Selatan. Berbagai tuntutan China menciptakan ketegangan dengan negara-negara di ASEAN. Beriringan dengan Klaim tersebut,

China menjadi lebih agresif dalam mengeksplorasi sumber daya alam di kawasan Laut China Selatan. Hal ini terlihat ketika banyak kapal-kapal patroli milik China berkeliaran di kawasan tersebut. Pada saat yang sama, Malaysia dan perusahaan minyaknya juga meningkatkan eksplorasi di Laut China Selatan.

Konflik Malaysia di kawasan Laut China Selatan dimulai setelah Peta baru yang dikeluarkan China dengan klaim *Nine Dash Linenya*. Filipina juga sebuah negara Penting dalam konflik di Laut China Selatan. Setelah keadaan memanas, Filipina mengeluarkan Keputusan Presiden yang memasukkan Kepulauan Spratly ke dalam kedaulatan Kepulauan Filipina. Sementara itu, wilayah klaim Taiwan di Laut China Selatan merupakan wilayah klaim China. Taiwan berpusat di sebuah pulau yang dikenal sebagai Itu Aba.

Pemerintah Vietnam turut serta dalam klaim wilayah Laut China Selatan ini didasarkan pada sejarah Perancis ketika menguasai Vietnam. Ketika penguasaan itu terjadi, Perancis melakukan ekspedisi hingga kawasan Laut China Selatan, termasuk Kepulauan Spratly dan Paracel (Maksum, 2017: 25)

Menurut Paulus Rudolf Yuniarto, seorang peneliti kewilayahan, mengatakan bahwa China akan mengirimkan kekuatannya untuk menjaga kawasan-kawasan yang bersengketa. China mengirimkan Kapal Patroli di kepulauan Spratly. Paulus mengatakan bahwa langkah agresif tersebut dapat memberikan citra buruk terhadap China di Asia Tenggara. Dalam tulisannya ia mengatakan bahwa "*China's aggressive actions in the South China Sea are eroding their reputation as a friendly political entity and alienating China's strong views, the source of its soft power in Southeast Asia.*" (bbc, China, kunjungan Menlu AS, dan sengketa di Laut Natuna: 'Ujian bagi Indonesia di antara kepentingan dua negara besar', 2021)



Gambar 9. Kapal China Di Perairan Natuna Utara

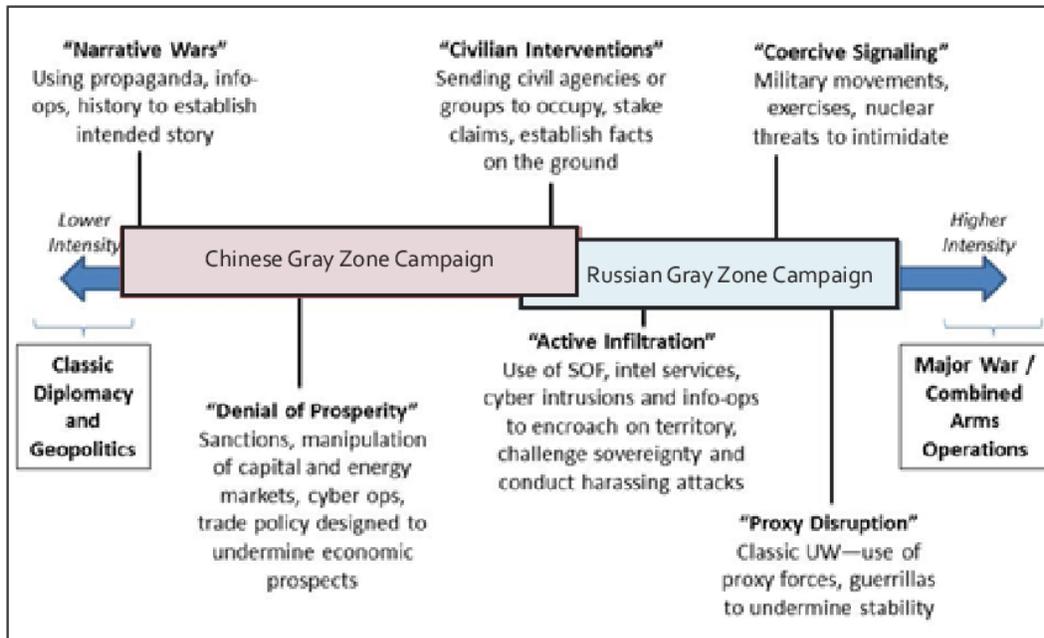
Sumber: (bbc, Kunjungan Menu AS, 2021)

Aksi agresif China juga dirasakan langsung oleh para nelayan tradisional Natuna. Mereka merasa resah dan terancam dengan aksi tidak bersahabat yang dilakukan oleh kapal China. Kapal-kapal tersebut mengusir dan memotong lajur kapal nelayan tradisional yang sedang beroperasi di wilayah tersebut. Ketegangan tersebut tentunya memberikan gesekan yang membuat pemerintah Indonesia perlu memperhatikan stabilitas keamanan di kawasan Natuna Utara.

Respons koersif China di kawasan Natuna Utara tak hanya dengan mengirimkan kapal-kapal patroli mereka. China juga mengerahkan kapal-kapal lain seperti kapal perusak Kuning-172 dan kapal riset Haiyang Dizhi-10. Kapal-kapal tersebut sudah berkeliaran di kawasan Laut Natuna Utara sejak Agustus hingga Oktober 2021. Hal tersebut turut dilakukan oleh China untuk menegaskan dan mempertahankan klaim *Nine dash Line* mereka. Konsep respons yang dilakukan china disebut juga dengan *Gray Zone Operation*.

Tindakan China dalam mengirimkan kapal-kapal nelayan dan dijaga oleh *Coast Guard* disebut juga sebagai *Gray Zone Operation*. Yakni suatu tindakan respons damai namun yang dilakukan dengan pendekatan koersif, dan operasi ini berada di bawah ambang batas operasi

militer terbatas. Karena operasi ini tidak dikategorikan dalam operasi militer maka kapal-kapal perang tidak diikuti sertakan dalam operasi tersebut. (Mazarr, 2015)



Gambar 10. China Gray Zone Campaign

Sumber: Mazarr (2015)

China juga mendeklarasikan terkait zona peringatan luar biasa maritim (*maritime extraordinary alert zone*). Hal ini dilakukan guna membatasi dan melarang kapal-kapal asing masuk ke area tersebut. Hingga saat ini China cenderung mengabaikan keputusan mahkamah internasional yang memberikan keputusan bahwa tidak disahkannya klaim *Nine Dash Line* Tersebut. Langkah agresif China untuk mempertahankan klaim dengan membangun kekuatan militer dan didukung kekuatan ekonomi melalui program pendanaan Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) sungguh tidak dapat dianggap remeh.

China juga banyak melakukan aktivitas ilegal di perairan Natuna Utara. Hal tersebut kerap dilakukan China sebagai bentuk tak acuh China pada Hukum Laut Internasional. Perilaku yang dilakukan China tersebut menuai banyak keresahan khususnya di kalangan para nelayan Indonesia di kawasan perairan Natuna Utara, berikut adalah Tabel Kronologi aktivitas ilegal China di Perairan Natuna Utara:

Tabel 1. Riwayat Aktivitas Ilegal China Di Kawasan Perairan Natuna Utara pada 2009-2020

No.	Tanggal	Lokasi	Insiden	Keterangan
1	Juni 2009	112 KM Timur Laut dari pangkal Pantai Pulau Sekatung	Aktivitas 8 kapal China dengan total 75 nelayan diamankan oleh kapal patroli Indonesia	Pemerintah China memberikan desakan untuk membebaskan nelayannya. 59 nelayan China dibebaskan.
2	Mei 2010	77 KM Timur Laut dari pangkal Pantai Pulau Laut	Intimidasi Kapal Hiu 04 oleh Kapal patroli China	Dua kapal nelayan China di bebaskan
3	Juni 2010	Perairan Natuna Utara	Intimidasi Kapal Hiu 10 oleh Kapal Patroli China	Kapal Patroli China memiliki Ukuran yang lebih besar
4	Mei 2012	Perairan Natuna Utara	Kapal Ikan Asing Gui Beiyu diamankan Oleh KRI SSA-378	Adanya Provokasi dari Kapal <i>Coast Guard</i> China
5	Maret 2013	Perairan Natuna Utara	Kapal Asing berbendera china di berhentikan oleh Kapal Hiu Macan	Adanya Provokasi dari Kapal Patroli China melalui radio komunikasi
6	Juni 2016	Perairan Natuna Utara	Kapal Shun Hang 618 Melakukan aktivitas <i>Illegal Fishing</i> diidentifikasi oleh KRI SSA-378	Adanya provokasi dari kapal <i>Coast Guard</i> 1411 China

7	Maret 2016	Perairan Natuna Utara	Kapal pengawas Hiu 11 Mendapat Intervensi	Kapal <i>Coast Guard</i> China menabrak Kapal Kway Fey
8	Mei 2016	Perairan Natuna Utara	Kapal Gui Beiyu 27088 kembali terdeteksi di kawasan Natuna Utara oleh KRI OWA-354	Kapal Ikan Asing Gui Bei Yu 27088 berhasil diamankan
9	Juni 2016	Perairan Natuna Utara	12 Kapal Ikan Asing China terdeteksi oleh KRI Imam Bonjol-383, salah satunya Kapal Han Tan Cou yang berusaha melarikan diri	Coast Guard China berusaha menghalangi penangkapan kapal tersebut. KRI Imam Bonjol-383 melepaskan tembakan peringatan
10	Desember 2019	Perairan Natuna Utara	kapal-kapal nelayan mereka yang dikawal pasukan penjaga pantai dan kapal perang fregat berlayar di perairan dekat Natuna	Indonesia mengeluarkan nota prote akan hal tersebut.
11	September 2022	Perairan Natuna Utara	Kapal penjaga pantai China (<i>China Coast Guard</i>) kembali kedatangan masuk perairan Natuna	diduga juga melakukan intimidasi kepada nelayan lokal yang sedang melaut

Sumber: (Riska, 2017)

4.3.2 Respons Persuasif

Pada pembahasan terkait bagaimana respons China terhadap Laut Natuna Utara salah satunya yaitu China merespons secara Persuasif. Yaitu China memberikan statement guna meyakinkan Dunia Internasional, Khususnya Indonesia bahwa di Laut China selatan memang merupakan wilayah kedaulatannya. China menekankan bahwa mereka memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha (spratly) dan juga Hak atas perairan di wilayah Kepulauan Nansha. (Majumdar, 2021).

Presiden Xi Jinping Juga memberikan Pernyataan bahwa ia menyarnkan agar Negara-Negara tetangga mengubah sikap antagonismenya menjadi sebuah sinegi, permusuhan menjadi sebuah persahabatan. Presiden Xi juga menyampaikan untuk membentuk komunitas dengan takdir yang sama untuk umat manusia.China menyatakan bahwa ia hanya ingin menangkap ikan di perairan yang menurutnya memiliki hak sejarah (*Traditional Fishing Ground*). China juga mengakui bahwa Indonesia tidak termasuk kedalam Negara yang ikut serta dalam Klaim Laut China Selatan (Rudiantara, 2020).

China dan Indonesia juga sepakat bahwa tidak ada sengketa di kawasan Laut Natuna Utara dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Hal ini dilakukan guna menjaga stabilitas keamanan kawasan tersebut. Insiden yang terjadi di kawasan Laut Natuna Utara dilakukan oleh duta besar China untuk Indonesia, Xiao Qiaan, hal tersebut tidak akan mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dengan China.



Gambar 11: Kapal nelayan berbendera China Han Tan Cou di dekat Kepulauan Natuna

Sumber: straitstimes.com (2016)

China telah menyampaikan klaimnya atas Laut Natuna Utara, serta wilayah Laut China Selatan yang lebih luas, melalui berbagai cara. Salah satu cara China menegaskan klaimnya adalah melalui penggunaan kapal angkatan laut dan penjaga pantainya untuk melakukan patroli dan latihan di perairan yang disengketakan. China juga telah membangun dan memelihara berbagai proyek infrastruktur di pulau-pulau yang disengketakan, termasuk fasilitas militer dan infrastruktur sipil seperti mercusuar dan stasiun cuaca (Adam, 2019)

Selain tindakan tersebut, China juga menggunakan saluran diplomatik untuk menyampaikan klaimnya. Misalnya, China secara konsisten menyatakan sikapnya terhadap sengketa Laut China Selatan dalam pertemuan bilateral dan multilateral dengan negara lain, maupun melalui pernyataan dan dokumen resmi. China juga telah berusaha untuk bernegosiasi dengan negara-negara lain di kawasan tersebut, termasuk Indonesia, untuk mencoba menyelesaikan perselisihan tersebut secara damai. Penting untuk dicatat bahwa klaim China atas wilayah Laut Natuna Utara dan Laut China Selatan tidak diakui secara universal oleh masyarakat internasional, dan diperdebatkan oleh sejumlah negara lain di wilayah tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi sengketa wilayah antara China dan Indonesia di wilayah Natuna Selatan yang terletak di Laut China Selatan. Indonesia, negara Asia Tenggara, menegaskan kedaulatannya atas wilayah tersebut, sementara China, negara adidaya global, mengklaim hak historis atas wilayah tersebut dan semakin tegas dalam tindakannya.

Wilayah Natuna Selatan penting secara strategis bagi kedua negara, karena terletak di jalur pelayaran yang sibuk dan kaya akan sumber daya alam seperti ikan dan minyak. Indonesia telah lama menganggap kawasan itu berada dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE), sementara China, melalui klaim "sembilan garis putus-putus", menegaskan hak historis atas kawasan tersebut dan semakin tegas dalam tindakannya (Santosa, 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi sejumlah insiden di mana kapal China memasuki perairan Indonesia dan bentrok dengan pihak berwenang Indonesia. Pada tahun 2016, misalnya, pihak berwenang Indonesia menahan kapal penangkap ikan Tiongkok dan awaknya karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah tersebut, yang menyebabkan perselisihan diplomatik antara kedua negara.

Menanggapi peristiwa tersebut, Indonesia telah mengambil sejumlah strategi untuk menegaskan kedaulatannya atas wilayah Natuna Selatan dan melindungi kepentingannya. Strategi ini mencakup upaya diplomatik, seperti bernegosiasi dengan China dan mencari dukungan dari negara lain, serta tindakan militer dan penegakan hukum, seperti mengerahkan kapal angkatan laut dan berpatroli di wilayah tersebut (Widiatmika, 2020)

Salah satu upaya diplomasi yang paling menonjol dari Indonesia adalah upayanya untuk mencari dukungan dari negara lain, khususnya negara-negara Asia Tenggara lainnya. Indonesia telah berupaya membangun koalisi dukungan di antara negara tetangganya untuk melawan ketegasan China di kawasan.

Selain upaya diplomasi, Indonesia juga menempuh langkah militer dan penegakan hukum untuk menegaskan kedaulatannya atas wilayah Natuna Selatan. Misalnya, Angkatan Laut Indonesia telah mengerahkan kapal ke wilayah tersebut dan melakukan patroli untuk memastikan keselamatan kapal Indonesia dan menegakkan hukum Indonesia.

Terlepas dari upaya ini, China terus menegaskan klaimnya atas wilayah Natuna Selatan dan semakin mempersif dalam tindakannya. Selain upaya militer dan diplomatiknya, China juga terlibat dalam pemaksaan ekonomi, menggunakan kekuatannya untuk mencoba mempengaruhi kebijakan Indonesia.

Misalnya, China telah menawarkan insentif ekonomi, seperti kesepakatan investasi dan perdagangan, kepada Indonesia dengan imbalan konsesi atas sengketa Natuna Selatan. Ia juga menggunakan tekanan ekonomi, seperti membatasi impor barang-barang Indonesia atau membatalkan proyek-proyek besar, untuk memaksa Indonesia menerima klaimnya.

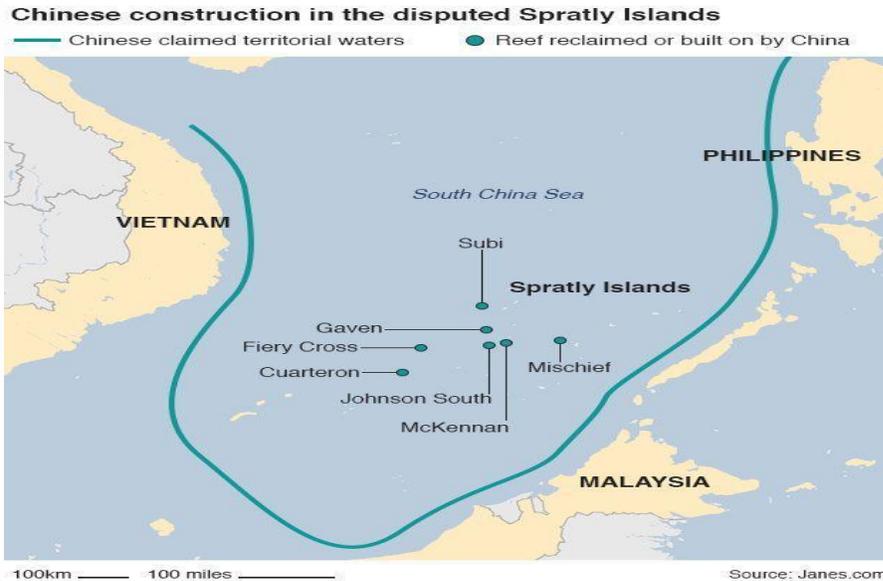
Secara keseluruhan, respons Indonesia terhadap ketegasan China di kawasan Natuna Selatan merupakan kombinasi dari langkah-langkah diplomatik, militer, dan penegakan hukum, serta upaya membangun koalisi dukungan di antara tetangganya. Sementara upaya ini telah membantu untuk menegaskan kedaulatan Indonesia dan melindungi kepentingannya, upaya tersebut juga ditanggapi dengan tindakan yang gigih dan persuasif oleh China.

Bill Hayton menjelaskan dalam bukunya terkait apa saja yang menjadi unsur daratan di kawasan Laut China Selatan. Pertanyaan tersebut ia sampaikan kepada Mahkamah Arbitrase untuk menjadi dasar dari klaim China di Laut China Selatan. Hayton menjelaskan bahwa dalam hukum laut internasional, unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai daratan dibagi menjadi tiga bagian yaitu (Hayton, 2014):

1. Pulau. Suatu daratan dapat dikatakan sebagai Pulau apabila daratan tersebut dapat menunjang aktivitas manusia atau kehidupan ekonomi secara mandiri. Daratan yang secara sah dapat dikatakan sebagai pulau maka memiliki hak atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Zona tersebut merupakan hak atas suatu negara untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar pulau tersebut dalam radius 200 mil dari pangkal pantai.
2. Karang. Unsur daratan ini didefinisikan sebagai bebatuan di atas permukaan laut ketika air pasang, terlepas berapapun besarnya. Sebuah negara yang memiliki karang berhak atas wilayah dalam radius 12 mil laut dari karang tersebut.
3. Terumbu. Unsur daratan ini hanya bisa terlihat saat air laut surut. Sebuah negara yang menguasai terumbu tidak memiliki hak atas sumber daya alam atau wilayah perairan apapun di sekitarnya.

Dari ketiga unsur daratan tersebut, China menguasai sejumlah terumbu di Laut China Selatan dan mereklamasinya menjadi pulau. Pulau-pulau buatan itu kemudian dilengkapi dengan pelabuhan dan landasan udara. Namun, dalam hukum laut internasional, sebuah

daratan atau pulau buatan tidak dapat diakui secara pulau dan tidak memiliki hak atas sumber daya alam atau wilayah perairan apapun di sekitarnya.



Gambar 12: Pulau

Buatan China Di Kawasan Laut China Selatan

Sumber: bbc.com (2016)

Pada juli 2016, Arbitrase Internasional membuat keputusan atas sengketa yang terjadi antara Filipina dan China. Keputusan yang dikeluarkan yaitu memenangkan Filipina atas kasus tersebut. China dalam hal ini tidak menerima keputusan tersebut dan memberikan pernyataan bahwa tuduhan yang diajukan oleh Filipina tidak memiliki dasar yang jelas.

Penting untuk dicatat bahwa China tidak memiliki sikap khusus yang dinyatakan secara formal di Laut Natuna Utara. Namun, China secara umum menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan penggunaan diplomasi dalam hubungan internasional.

Dalam konteks yang lebih luas di Laut China Selatan, di mana Laut Natuna Utara berada, China secara konsisten mempertahankan kedaulatannya atas pulau-pulau yang disengketakan dan perairan sekitarnya di wilayah tersebut. Namun, ia juga menyatakan bersedia menyelesaikan perselisihan tersebut melalui cara damai, termasuk melalui negosiasi dan konsultasi dengan negara lain yang terlibat.

China juga telah menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama dengan negara-negara lain di kawasan ini dalam isu-isu seperti keamanan maritim dan perlindungan lingkungan laut.

Misalnya, China telah terlibat dalam patroli bersama dengan Indonesia di Laut Natuna, dan telah berpartisipasi dalam upaya regional untuk mengatasi kejahatan transnasional seperti pembajakan dan penangkapan ikan ilegal (Fitriyanto, 2020)

Secara keseluruhan, tampaknya pendekatan China ke Laut Natuna Utara dan wilayah Laut China Selatan yang lebih luas adalah salah satu upaya untuk menyeimbangkan klaim teritorialnya dengan keinginan untuk menghindari konflik dan menjaga hubungan baik dengan tetangganya.

4.3.3 Respons Proaktif

China juga memberikan respons yang proaktif terkait sengketa di Laut Natuna Utara. Respons Proaktif yang diberikan China cenderung mempertimbangkan banyak hal untuk merespons protes-protes yang muncul di sekitar kawasan Laut China Selatan. China juga cenderung memberikan banyak solusi dan tidak terlalu menyuarkan konflik. Hal tersebut dilakukan China guna menjaga hubungan bilateral dengan Indonesia.

Mempertahankan hubungan kerjasama antara China dan Indonesia harus lebih diutamakan, oleh sebab itu China bersikap Proaktif dalam sengketa yang terjadi di Natuna. Hal tersebut juga disepakati oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto. Prabowo mengatakan bahwa China adalah negara yang bersahabat. pernyataan tersebut juga di perkuat oleh Luhut Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Luhut mengatakan bahwa China dengan Indonesia tidak seharusnya bertengkar untuk sesuatu yang menurutnya tidak perlu menjadi sebuah masalah.

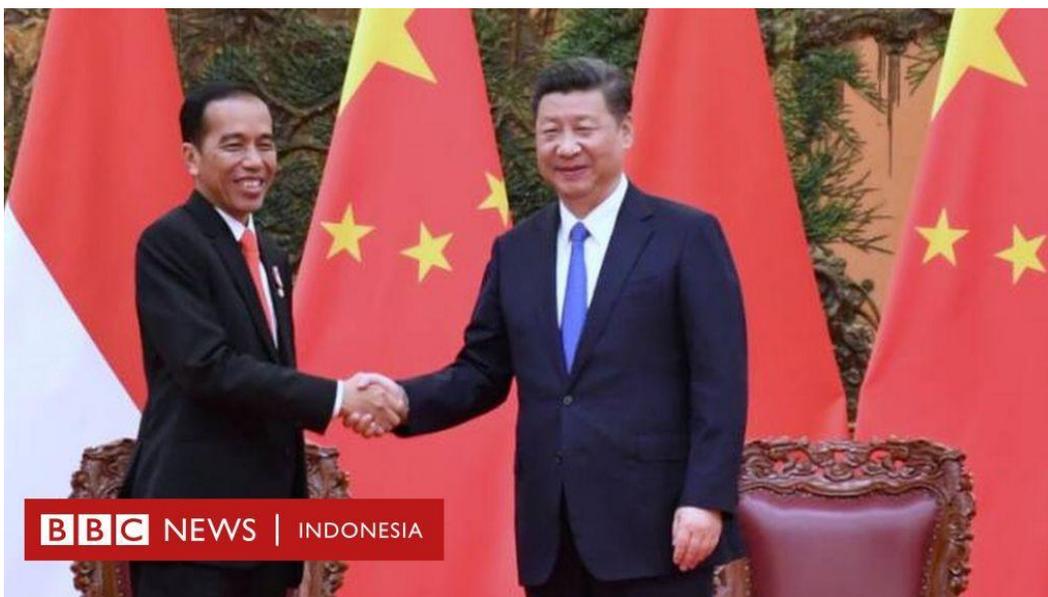
China menempati peringkat ke 4 dalam urutan negara yang berinvestasi di Indonesia dengan jumlah total investasi USD 20.839 milyar. China menunjukkan sikap yang bersahabat dengan tetap menjalin kerjasama dengan Indonesia meski terjadi konflik di Laut Natuna Utara. China juga melarang Indonesia untuk bersikap agresif di kawasan Laut China Selatan, dengan ancaman China akan memutuskan mitra dagang dan investasinya. Hingga saat ini hubungan kerjasama China dan Indonesia relatif stabil dan tidak terpengaruh dengan konflik di Laut Natuna Utara (Setiawan, 2022).

Investasi yang diberikan China sangat dibutuhkan untuk menghidupkan kembali perekonomian Indonesia yang diperkirakan akan tetap lesu tahun depan akibat melemahnya ekspor, harga komoditas, dan ketidakpastian global. Indonesia lebih memilih mengurungkan

kebijakan luar negerinya yang agresif, begitu pula dengan China memilih untuk tidak terlalu membesarkan konflik yang terjadi di Laut China Selatan.

Respons proaktif China semakin terlihat ketika China memberikan Investasi *One Belt One Road* (OBOR) yang sekarang disebut sebagai *Belt and Road Initiative* (BRI). Pada tahun 2019 nilai investasi BRI meningkat hingga lima kali lipat, yang semula bernilai USD 1 triliun atau setara dengan Rp 14 ribu triliun meningkat menjadi USD 5 triliun atau setara dengan Rp 80 ribu triliun. China tentunya memiliki kepentingan dengan Indonesia, sehingga respons china terhadap Laut Natuna Utara cenderung Proaktif dan tidak memaksakan kehendaknya.

Belt and Road Initiative (BRI) merupakan program yang diinisiasi Xi Jinping pada 2013 lalu. Program itu bertujuan membangun infrastruktur darat, laut, dan udara secara besar-besaran untuk meningkatkan dan memperbaiki jalur perdagangan dan ekonomi antar negara di Asia dan sekitarnya. Untuk Indonesia, BRI sudah sangat membantu dalam membangun sejumlah proyek, di antaranya adalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, proyek PLTA Sungai Kayan, dan pembangunan kawasan industri Tanah Kuning. Pendanaan proyek-proyek tersebut dilakukan



dengan skema business to business atau B to B.

Gambar 13. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China, Xi Jinping

Sumber: (bbc, Jokowi tawarkan tiga mega proyek ke Xi Jinping, 2017.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39918487>)

China juga sepakat untuk terus meningkatkan kualitas kerja sama bilateral dengan Indonesia. Kerja sama tersebut memiliki empat pilar utama yaitu Politik, Ekonomi, dan Sosial-Budaya dan Kelautan. Meski konflik yang terjadi di wilayah perairan namun China tetap menjalankan kerja sama di bidang kelautan. Indonesia dan China juga memiliki hubungan bilateral dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) atau yang biasa disebut nota kesepakatan dalam Kerjasama Perikanan pada tahun 2012. Di dalam kesepakatan tersebut berisi tentang pemberantasan illegal fishing, Namun MoU ini belum mencapai titik operasional.

Duta besar China untuk Indonesia, Xian Qian, menyatakan bahwa perairan Natuna memang merupakan wilayah Indonesia. Pernyataan tersebut dibuat dengan tujuan agar hubungan bilateral Indonesia dengan China tetap stabil. Kerjasama Indonesia dan China bergerak secara aktif dan terus berkembang di berbagai bidang. Pada 2015, China dan Indonesia resmi menandatangani dokumen-dokumen kerjasama kemitraan strategis yang memberikan fokus kerjasamanya di bidang pengembangan perdagangan dan pembangunan infrastruktur. Hubungan bilateral yang dilakukan oleh kedua belah pihak tentunya dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan kerja baru.

Hingga saat ini kerja sama antara China dan Indonesia berjalan cukup baik. Pada November 2022 dalam acara *B20 Investment Forum 2022* di Bali, China dengan Indonesia melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menandatangani nota kesepakatan atau MoU. Hal tersebut merupakan langkah awal dari proyek kerja sama dengan total nilai investasi mencapai USD 5 miliar.



Gambar 14. Penandatanganan MoU pada B20 Investment Forum 2022

Sumber: (Arifin, 2022)

Kita dapat melihat bahwa dengan kerja sama China dengan Indonesia di berbagai bidang tentu memberikan gambaran bahwa China ingin tetap berhubungan baik dengan Indonesia. Respons China dalam hal ini tentu Proaktif dan terlihat tidak terlalu ingin membesarkan konflik yang terjadi di Laut China Selatan. Meskipun pemerintah Indonesia memberikan kebijakan-kebijakan sepihak dan tetap menegaskan terkait ZEEnya, China Memberikan Respons yang cukup beragam

Indonesia dan China memiliki sejarah kerja sama perdagangan yang panjang, dengan China sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Indonesia ke China pada tahun 2020 senilai \$16,6 miliar, sedangkan impornya dari China senilai \$22,5 miliar.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan sejarah perdagangan antara Indonesia dan China:

Tabel 2. Riwayat Perdagangan Ekspor dan Impor Indonesia dan China

Tahun	Ekspor Indonesia ke China (dalam US\$ miliar)	Impor Indonesia dari China (dalam US\$ miliar)
2017	25.7	36.8
2018	27.4	39.1
2019	28.3	41.3
2020	26.8	38.7
2021	28.2	40.1

Sumber: (Abduh, 2017)

Barang utama yang diekspor Indonesia ke China antara lain minyak dan gas, batu bara, karet, dan hasil hutan. Indonesia juga merupakan pemasok utama bahan mentah ke China, termasuk tembaga, nikel, dan timah. Di sisi lain, Indonesia mengimpor berbagai macam barang manufaktur dari China, antara lain produk elektronik, tekstil, dan mesin.

Indonesia dan China juga telah menjalin sejumlah perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan perjanjian kerjasama ekonomi untuk memfasilitasi perdagangan kedua negara. Ini termasuk Indonesia-China Comprehensive Economic Cooperation Agreement (ICCECA), yang ditandatangani pada 2017 dan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara kedua negara.

Selain perdagangan tradisional, Indonesia dan China juga menjalin kerja sama ekonomi lainnya, seperti investasi dan joint venture. Perusahaan China telah berinvestasi di berbagai sektor di Indonesia, termasuk infrastruktur, manufaktur, dan sumber daya alam.

Secara keseluruhan, Indonesia dan China memiliki hubungan perdagangan yang kuat dan saling menguntungkan, dengan kedua negara memperoleh manfaat dari peningkatan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Namun demikian, terdapat pula beberapa tantangan dan permasalahan dalam hubungan tersebut, antara lain kekhawatiran terhadap neraca perdagangan kedua negara dan dampak impor China terhadap industri dalam negeri Indonesia.

kehadiran China di Indonesia cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan sejumlah proyek infrastruktur yang didanai China sedang dilaksanakan di negara tersebut. Beberapa contoh proyek tersebut antara lain pembangunan jalur kereta api cepat antara Jakarta dan Bandung, pembangkit listrik di Jawa Tengah, dan pelabuhan di Sumatera Utara.

Perlu juga dicatat bahwa Indonesia adalah penerima utama investasi China di Asia Tenggara. Menurut data Kementerian Perdagangan China, perusahaan China menginvestasikan total \$5,3 milyar di Indonesia pada tahun 2019, menjadikannya penerima investasi China terbesar di wilayah tersebut (Wijaya, 2020).

Penting untuk dicatat bahwa tingkat investasi China di Indonesia telah menjadi sumber kontroversi di negara ini, dengan beberapa menyatakan keprihatinan tentang dampak potensial terhadap ekonomi dan lapangan kerja lokal, serta tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam proyek-proyek tersebut. .

China adalah pengeksport utama ponsel ke Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah ponsel yang diimpor ke Indonesia dari China. Menurut data Kementerian Perdagangan Indonesia, pada tahun 2020, Indonesia mengimpor ponsel senilai total \$2,7 miliar dari China, terhitung sekitar 70% dari total impor ponsel Indonesia. (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2021)

Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekspor ponsel China ke Indonesia. Salah satu faktor utamanya adalah harga ponsel produksi China yang relatif murah sehingga menarik bagi konsumen Indonesia. Selain itu, kemampuan manufaktur China yang kuat dan infrastruktur rantai pasokan telah memungkinkannya memproduksi berbagai ponsel dengan harga bersaing.

Selain permintaan ponsel dengan harga terjangkau, permintaan ponsel pintar kelas atas di Indonesia juga meningkat, yang juga berkontribusi pada pertumbuhan ekspor ponsel China ke negara tersebut. Banyak merek smartphone China, seperti Huawei dan Xiaomi, telah mendapatkan pengikut yang kuat di Indonesia, dan mampu bersaing secara efektif dengan merek internasional yang lebih mapan. Secara keseluruhan, ekspor ponsel China ke Indonesia kemungkinan akan terus tumbuh di tahun-tahun mendatang, didorong oleh permintaan perangkat yang terjangkau dan meningkatnya popularitas smartphone kelas atas.

Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekspor ponsel China ke Indonesia. Salah satu faktornya adalah meningkatnya keterjangkauan ponsel China, yang harganya menjadi lebih kompetitif dalam beberapa tahun terakhir karena perbaikan dalam proses manufaktur dan skala ekonomi. Faktor lainnya adalah kuatnya permintaan ponsel di Indonesia, yang memiliki populasi besar dan berkembang pesat dengan tingkat pendapatan yang terus meningkat.

Selain itu, produsen ponsel China telah melakukan investasi signifikan dalam penelitian dan pengembangan, yang memungkinkan mereka memproduksi berbagai ponsel berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia. Hal ini telah membantu produsen ponsel China membangun kehadiran yang kuat di pasar Indonesia dan bersaing secara efektif dengan produsen internasional lainnya.

Secara keseluruhan, perkembangan ekspor ponsel China ke Indonesia didorong oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan keterjangkauan, permintaan yang kuat, dan inovasi teknologi.